KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR minta dana rumah aspirasi tidak dipermasalahkan
Tanggal : Sabtu, 14 Februari 2015
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

DPR Minta Dana Rumah Aspirasi tidak Dipermasalahkan

DPR bakal mendapatkan suntikan anggaran Rp1,6 triliun dari APBN Perubahan 2015. Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani angkat bicara terkait dengan peruntukan dana yang kini menjadi sorotan publik itu.

Ia mengatakan Rp1 triliun untuk gaji tenaga ahli serta operasional rumah aspirasi, sedangkan Rp600 miliar dikelola kesekjenan DPR. Menurut anggota DPR dari Fraksi NasDem tersebut, BURT belum memutuskan teknis pengalokasian dana aspirasi. "Nanti dirapatkan setelah diketuk palu," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Irma menjelaskan dana rumah aspirasi sebenarnya telah diatur dalam Tatib DPR dan amanat UU MD3 sehingga tidak perlu diributkan. Dia menambahkan, rumah aspirasi memang sudah seharusnya ada guna kepentingan konstituen anggota DPR di daerah pemilihan masing-masing.

"Saya belum mengetahui jumlah dana rumah aspirasi untuk setiap anggota dewan tiap tahunnya. Tapi, dana itu memang penting dan sudah diatur dalam Tatib DPR dan UU MD3. Nantinya dana aspirasi bakal diawasi ketat," bebernya.

Menurut Irma, bentuk pengawasan dana aspirasi ialah pengaturan terhadap luas minimal bangunan, lokasi di tempat strategis, hingga menyangkut perabotan di rumah aspirasi. Selain itu, setiap anggota DPR harus membuat laporan dengan surat-surat yang lengkap.

"Kami minta detail berapa yang harus dibayarkan hingga bukti foto agar masyarakat tahu ini bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Di sisi lain, anggota Badan Anggaran Syaifullah Tamliha setuju dengan tambahan anggaran untuk operasional tenaga ahli di daerah pemilihan. "Anggota DPR sering kesulitan menampung aspirasi konstituen karena tak ada staf pembantu di daerah," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Formappi Sebastian Salang mempertanyakan urgensi dana tambahan DPR tersebut. Pasalnya, selama ini penggunaan anggaran oleh DPR tak pernah transparan serta belum ditopang oleh kinerja memadai. (Pol/P-5)